

Majalah Digital Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Timur



ASPIRASI *kita*

Edisi 14

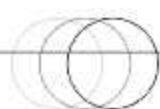
Monthly Report **Fraksi PKS DPRD JATIM**

Jejak Pengabdian Fraksi PKS
DPRD Provinsi Jawa Timur

FEBRUARI 2026

Daftar Isi

Sampul Halaman	1
Daftar Isi	2
Profil Singkat Dewan	3
Ringkasan Kinerja Fraksi	4 - 13
Kiprah Dewan	14 - 36
Galeri Foto Kegiatan	37 - 50
Penutup	51





PIMPINAN FRAKSI

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2025-2029

H. AGUS CAHYONO SHI. MHI.

WAKIL PARTAI KOMISI 4 DPRD
JATIM ANGGOTA FRAKSI PKS

DR. H. PUGUH WIJI PAMUNGKAS, MM

ANGGOTA KOMISI 4 DPRD JATIM
SEKUTERA FRAKSI PKS

HJ. LILIK HENDARWATI

ANGGOTA KOMISI 4 DPRD JATIM
SEKUTERA FRAKSI PKS

DRS.H.M. KHUSNUL KHULUK

ANGGOTA KOMISI 4 DPRD JATIM
ANGGOTA FRAKSI PKS

HARISANDI SAVARI, S.PT., S.T

ANGGOTA KOMISI 4 DPRD JATIM
SEKUTERA FRAKSI PKS

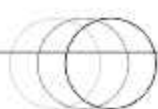
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Februari 2026:



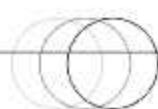
Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur | Rabu, 18 Februari 2026

Agenda Penyampaian Nota Penjelasan Gubernur atas Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Perseroda) Jawa Timur. sebagai langkah memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



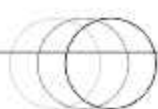
Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Jatim selama Februari 2026:



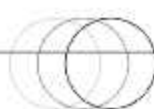
Senin, 23 Februari 2026

Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Jawa Timur. Pada tahap ini, fraksi-fraksi menyampaikan pandangan dan masukan sebagai bagian dari proses menuju pembahasan berikutnya.



Agenda Rapat Paripurna

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur
Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026



Agenda Reses

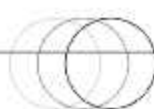
Reses Masa Persidangan II
Tahun Sidang 2025-2026



Bersama Bapak Mokhammad Najih, Ph.D Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2021 - 2026. Mendiskusikan berbagai mekanisme aduan publik untuk penyelenggaraan negara yang lebih baik.



Bersama rombongan komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan dan rapat koordinasi dengan BPVP Kemenaker RI bersama Disnakertrans Jatim pada Jumat (6/2/2026)



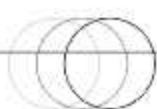
Agenda Komisi-Komisi



Bersama rombongan komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan Monev di UPT RSBN Malang, memastikan layanan dasar dan inovasi program untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi mereka berjalan dengan baik.



Bersama rombongan komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke dinas pendidikan kota batu dalam rangka meninjau kesiapan sekolah inklusi dan penguatan komponen raperda disabilitas Jatim.



Agenda Badan - Badan



Rapat Banggar

Banggar dalam Studi Komparatif Badan Anggaran dalam Meningkatkan Kemandirian Keuangan dan Optimalisasi Kontribusi Terhadap PAD

Rapat Pansus

Rapat pansus bersama bumd tgl 2 februari 2026



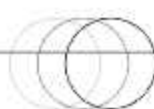
FRAKSI PKS JATIM MINTA RAPERDA PENYERTAAN MODAL JAMKRIDA DISERTAI ROADMAP DAN PENGUATAN PENGAWASAN



Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Jawa Timur harus disertai roadmap yang jelas, penguatan indikator kinerja, serta mekanisme pengawasan yang lebih spesifik dan terukur.

Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Agus Cahyono, dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, Senin (23/2/2026). Dalam penyampaian, Agus terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur atas penjelasan terkait urgensi penambahan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar kepada Jamkrida.

Pemerintah Provinsi menilai tambahan modal diperlukan untuk memperkuat kapasitas penjaminan UMKM dan koperasi yang jumlahnya mencapai 9,78 juta unit usaha di Jawa Timur. Selain itu, capaian nilai penjaminan sebesar Rp10,11 triliun kepada 122.750 UMKM serta rencana digitalisasi layanan dan dukungan terhadap program Kredit Sejahtera (Prokesra) menjadi bagian dari argumentasi eksekutif.



Namun demikian, Fraksi PKS menegaskan bahwa Raperda ini bukan sekadar penambahan angka dalam neraca perusahaan daerah, melainkan keputusan politik anggaran yang menyangkut uang rakyat dan risiko fiskal daerah. “Penyertaan modal bukan investasi bebas risiko. Ini adalah uang rakyat yang harus memberi dampak sosial-ekonomi nyata,” tegas Agus.

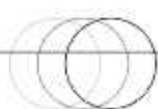
F PKS menilai, meski aset dan ekuitas Jamkrida tumbuh, pertumbuhan tersebut lebih banyak ditopang oleh penyertaan modal daerah dibandingkan laba organik. Dengan ROA 1,74 persen dan ROE 4,80 persen pada 2024, Fraksi PKS mempertanyakan optimalisasi daya hasil modal terhadap risiko bisnis penjaminan. “Pertanyaannya sederhana, apakah APBD sedang membangun mesin ekonomi, atau hanya mempertebal bantalan risiko?” ujar Agus.

Fraksi PKS juga meminta penjelasan detail mengenai kesesuaian modal Jamkrida dengan ketentuan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (POJK 10/2025), termasuk posisi modal saat ini, potensi gap, dan peta jalan pemenuhan modal tanpa ketergantungan berulang pada APBD. Selain itu, Fraksi PKS menyoroti belum adanya klausul tegas dalam Raperda terkait pembatasan penggunaan modal untuk skema berisiko rendah. Tambahan modal dikhawatirkan hanya memperkuat portofolio yang sudah aman secara bisnis, bukan memperluas akses bagi UMKM mikro yang benar-benar belum bankable.

“Tambahan modal harus disertai afirmasi jelas bagi UMKM mikro dan kecil yang selama ini underserved,” tegasnya. Fraksi PKS juga menilai mekanisme pengawasan dalam Raperda masih bersifat umum. Tidak ada ketentuan spesifik mengenai laporan rasio klaim, cadangan teknis, stress test keuangan, maupun audit tematik atas manajemen risiko dan dampak sosial. Tanpa pengaturan indikator kinerja berbasis outcome, seperti peningkatan jumlah UMKM bankable atau multiplier effect ekonomi, DPRD dikhawatirkan hanya menerima laporan administratif tahunan tanpa daya kontrol mendalam.

“BUMD strategis seperti Jamkrida harus diuji dengan standar akuntabilitas tertinggi. Jangan sampai DPRD hanya menjadi stempel kebijakan investasi daerah,” kata Agus. Di akhir pandangan umumnya, Fraksi PKS menegaskan tidak akan menyetujui penambahan penyertaan modal tanpa perubahan mendasar dalam arah kebijakan dan tata kelola bisnis Jamkrida.

F PKS mensyaratkan penajaman target penerima manfaat, pembatasan dominasi skema multiguna, indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta roadmap peningkatan kontribusi PAD yang konkret. “Jamkrida membawa mandat sosial sekaligus mandat ekonomi. Jika hanya aman secara laporan tetapi tidak progresif dalam keberpihakan, maka visi awalnya bisa bergeser. Kita ingin uang rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat,” pungkas Agus.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Banyaknya aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang terbengkalai mendorong DPRD Jatim mendesak lahirnya Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang pengelolaan aset. Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menilai payung hukum tersebut sudah menjadi kebutuhan mendesak. Lilik mengungkapkan, Pemprov Jatim saat ini memiliki ribuan aset bernilai tinggi, namun belum seluruhnya dikelola secara optimal akibat lemahnya regulasi dan kepastian hukum.

Lilik mengungkapkan, Pemprov Jatim saat ini memiliki ribuan aset bernilai tinggi, namun belum seluruhnya dikelola secara optimal akibat lemahnya regulasi dan kepastian hukum. "Sudah saatnya Jawa Timur memiliki perda pengelolaan aset. Banyak aset milik pemprov yang sekarang justru terbengkalai dan belum memberi manfaat maksimal bagi masyarakat," ujar Lilik.

Legislator PKS itu menjelaskan, Pemprov Jatim sebenarnya telah melakukan digitalisasi data aset. Namun tanpa regulasi yang kuat, upaya tersebut belum mampu mendorong optimalisasi pemanfaatan aset secara transparan dan produktif.

"Digitalisasi aset sudah dilakukan, tinggal bagaimana itu dimaksimalkan. Karena itu perlu payung hukum berupa perda agar pengelolaan aset lebih tertata, transparan, dan akuntabel," tegasnya. Lilik juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada publik. Menurutnya, masyarakat perlu diberi akses untuk mengetahui aset-aset milik Pemprov Jatim yang berpotensi dimanfaatkan bagi kepentingan umum maupun peningkatan pelayanan publik.



“Kami mendorong agar publik tahu aset apa saja yang dimiliki Pemprov dan mana yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Ini penting agar aset daerah tidak hanya tercatat, tetapi benar-benar hidup dan produktif,” jelas Ketua Fraksi PKS Jatim itu.

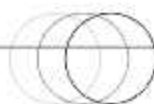
Berdasarkan data yang ada, Pemprov Jawa Timur memiliki sekitar 11.000 hingga 12.000 bidang aset tanah. Namun baru sekitar 23 persen yang berstatus legal atau clear and clean. Kondisi ini menjadi hambatan besar dalam upaya optimalisasi aset daerah.

Aset-aset yang belum memiliki kepastian hukum tersebut mencakup lahan pendidikan, jalan provinsi, hingga jaringan irigasi dan pengairan. Padahal, nilai total aset tetap Pemprov Jawa Timur diperkirakan mencapai lebih dari Rp120 triliun.

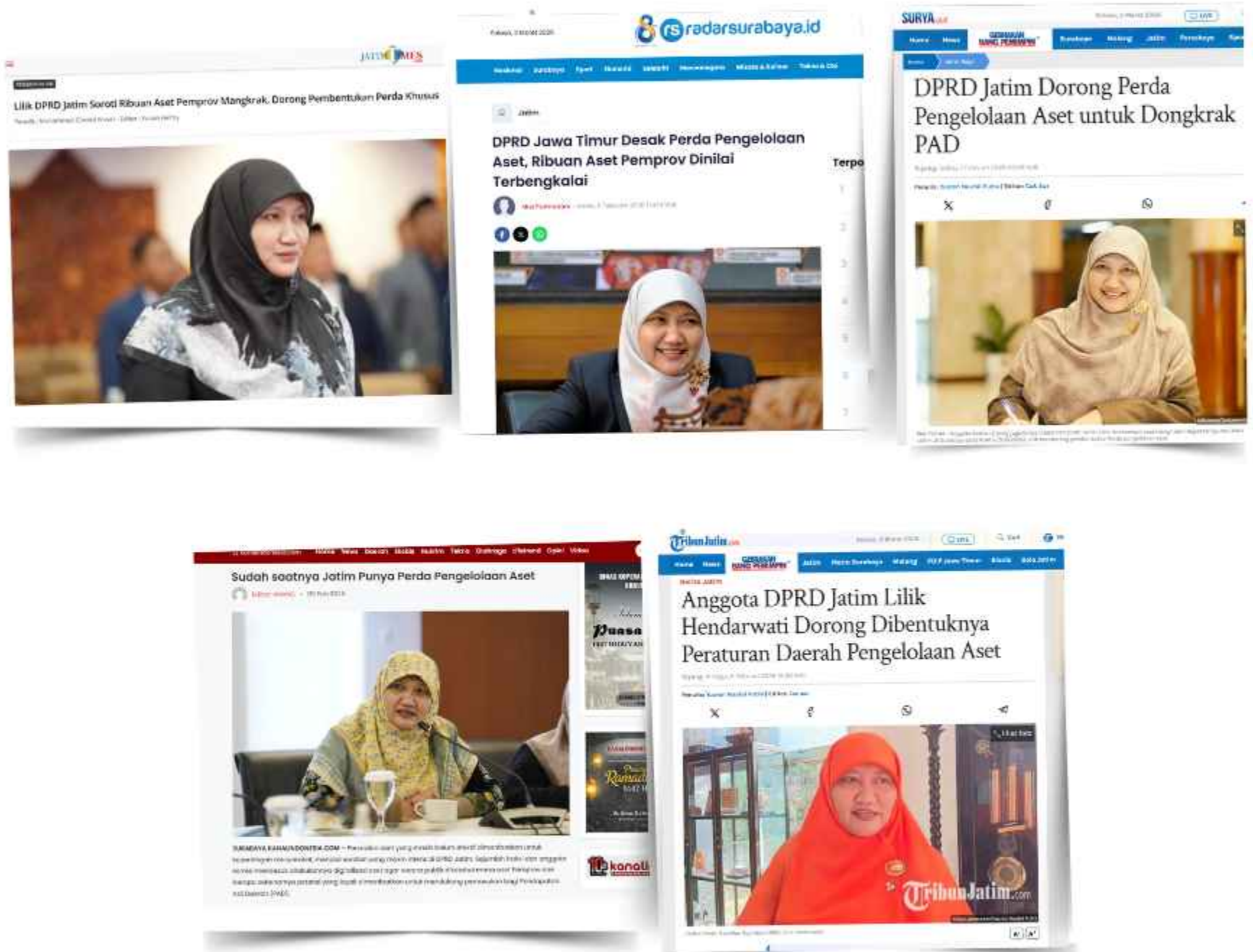
Lilik menilai, tanpa regulasi yang kuat dan pengelolaan yang profesional, potensi besar tersebut berisiko terus menjadi beban, bukan sumber kekuatan fiskal daerah.

“Kalau dikelola dengan baik, aset daerah bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tapi kalau dibiarkan tanpa aturan jelas, aset justru menjadi masalah,” pungkasnya.

Ia berharap, wacana pembentukan Perda Pengelolaan Aset dapat segera dibahas bersama pemerintah provinsi sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah di Jawa Timur



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



Duta Pesona Indonesia melakukan audiensi dengan DPRD Jawa Timur dan diterima langsung oleh Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas, di Gedung DPRD Jatim, Senin (2/2/2026). Pertemuan ini membahas penguatan peran generasi muda dalam pengembangan dan promosi pariwisata di Jawa Timur. Puguh menyampaikan, Duta Pesona Indonesia merupakan komunitas anak muda yang berperan sebagai brand ambassador pariwisata nasional. Dalam audiensi itu, para duta menyampaikan berbagai gagasan serta masukan terkait strategi menumbuhkan potensi wisata yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Timur.

“Jawa Timur ini memiliki kelengkapan potensi yang luar biasa, mulai dari sumber daya alam hingga kekayaan budaya. Tantangannya sekarang adalah bagaimana potensi itu dikelola dan dipromosikan secara optimal,” ujar legislator PKS. Menurutnya, sektor pariwisata Jawa Timur masih menghadapi sejumlah kendala, di antaranya persoalan konektivitas infrastruktur, arah kebijakan, serta intervensi anggaran. Selain itu, Puguh juga menyoroti fenomena menjamurnya desa wisata yang belum seluruhnya dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

“Desa wisata tidak boleh sekadar ikut tren atau FOMO. Harus ditata kelolanya dengan baik agar bisa tumbuh secara berkelanjutan dan benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat bawah,” tegasnya. Puguh menambahkan, penguatan ekosistem pariwisata desa sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Dengan jumlah desa di Jawa Timur yang mencapai sekitar 8.000 desa, sektor pariwisata dinilai memiliki daya ungkit besar terhadap perekonomian daerah.

“Kalau ekosistem pariwisata desa tumbuh, otomatis roda ekonomi desa akan bergerak. Ini akan memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan daya dukung ekonomi yang sangat besar,” jelasnya. Terkait masih banyaknya objek wisata yang mangkrak, Puguh menekankan pentingnya aspek tata kelola dan kualitas sumber daya manusia pengelola wisata. Menurutnya, kebijakan dan anggaran yang ada tidak akan berdampak maksimal tanpa manajemen yang baik.

Ia juga mengapresiasi peran Duta Pesona Indonesia dalam mempromosikan pariwisata, terutama di era digital saat ini. Keberadaan para duta dinilai strategis dalam membangun citra positif pariwisata Jawa Timur melalui media sosial. “Di era digital, promosi wisata sangat bergantung pada viralitas. Anak muda harus menjadi motor utama promosi pariwisata, karena hari ini orang mengenal destinasi wisata lewat smartphone,” katanya. Puguh berharap, sinergi antara pemerintah daerah, desa, komunitas pariwisata, media, serta generasi muda dapat terus diperkuat agar pengembangan pariwisata Jawa Timur berjalan optimal dan berkelanjutan.



**Duta Pesona Indonesia
Bertemu DPRD Jatim,
Puguh: Anak Muda Harus
Jadi Motor Pariwisata**

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



MAKLUMAT – Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa pengajuan tambahan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jawa Timur tidak bisa dibahas secara normatif dan administratif semata. Politisi yang juga anggota Komisi C DPRD Jatim sekaligus anggota Pansus BUMD itu menyebut momentum ini harus menjadi ruang koreksi serius terhadap arah dan praktik bisnis Jamkrida selama ini. Menurut Lilik, secara mandat publik Jamkrida merupakan BUMD strategis yang berfungsi sebagai penjamin kredit UMKM. Peran tersebut dinilai sangat relevan mengingat sekitar 77,6 persen UMKM di Jawa Timur masih belum bankable.

“Dari sisi justifikasi sosial, Jamkrida sangat dibutuhkan. Namun sebagai Perseroda yang menerima penyertaan modal daerah, Jamkrida wajib diuji tidak hanya dari sisi manfaat sosial, tetapi juga kesehatan keuangan, manajemen risiko, dan kontribusi fiskalnya terhadap PAD,” tegas Lilik dalam rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (23/2/2026). Sehat Likuiditas, Lemah Profitabilitas Berdasarkan paparan kinerja periode 2020–2025 yang disampaikan dalam rapat Pansus BUMD, Lilik mengakui terdapat pertumbuhan skala usaha yang terlihat dari peningkatan total aktiva, ekuitas, dan volume penjaminan. Namun, ia menilai pertumbuhan tersebut masih ditopang oleh modal daerah, bukan hasil akumulasi laba organik perusahaan. Laba bersih dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun dinilai relatif kecil jika dibandingkan dengan skala aktiva dan risiko usaha yang ditanggung.

“Rasio keuangan menunjukkan perusahaan sehat dari sisi likuiditas dan solvabilitas, tetapi lemah dari sisi profitabilitas dan efisiensi modal. Artinya, Jamkrida tampak aman, tetapi belum produktif bagi fiskal daerah,” ujarnya. Dinilai Menyimpang dari Mandat Sosial Lilik juga mengkritisi arah portofolio penjaminan yang dinilai semakin dominan pada skema multiguna dan sektor yang relatif aman secara bisnis. “Secara konseptual, Jamkrida dibentuk sebagai instrumen keberpihakan untuk menembus kebuntuan akses pembiayaan UMKM mikro dan kecil. Tapi yang terjadi, UMKM paling lemah justru masih tertinggal,” katanya. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks sekaligus penyimpangan dari visi awal pembentukan BUMD tersebut.

“Jika Jamkrida terus bergerak dengan logika aman secara risiko tetapi menjauh dari mandat sosial, maka kita patut bertanya: untuk siapa sebenarnya BUMD ini bekerja?” tegas Lilik. Tolak Tambahan Modal Tanpa Perubahan Mendasar Fraksi PKS, lanjut Lilik, tidak akan menyetujui penambahan penyertaan modal tanpa perubahan mendasar dalam arah kebijakan bisnis Jamkrida. Ia menegaskan, setiap tambahan modal dari APBD harus disertai penajaman target penerima manfaat, khususnya UMKM mikro dan kecil, pembatasan yang jelas terhadap dominasi skema multiguna, serta indikator kinerja yang terukur dan dapat diaudit publik.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





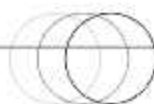
RESES DI KOTA MALANG, PUGUH DPRD JATIM DORONG REVITALISASI ANGKOT JADI TULANG PUNGGUNG TRANSPORTASI PUBLIK

Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu), Puguh Wiji Pamungkas, menggelar kegiatan reses pada 8–15 Februari 2026. Salah satu agenda digelar di Kota Malang bersama organisasi angkutan darat (Organda) dan para sopir angkutan kota (angkot). Kegiatan serap aspirasi tersebut berlangsung penuh antusiasme. Hadir para ketua jalur angkot serta Ketua Organda Kota Malang yang turut memberikan sambutan dalam forum dialog. Dalam kesempatan itu, Puguh menyoroti transformasi Kota Malang yang berkembang dari kota pendidikan menjadi kota metropolitan. Menurutnya, perubahan tersebut membawa konsekuensi pada tiga tantangan besar: kemacetan, persoalan lingkungan/sampah, dan potensi banjir. “Kota Malang identik sebagai kota pendidikan dan wisata heritage. Maka pengalaman yang nyaman bagi masyarakat dan wisatawan harus menjadi prioritas. Salah satu kuncinya adalah pengelolaan transportasi publik yang baik,” ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.

Puguh menegaskan, angkutan kota masih sangat relevan sebagai moda transportasi publik di Malang. Hal ini karena dimensi jalan yang terbatas dan tidak bertambah, sementara volume kendaraan pribadi terus meningkat, terutama saat akhir pekan ketika ribuan kendaraan masuk ke kota. “Ruas jalan di Kota Malang tidak bertambah, tetapi jumlah kendaraan terus naik. Angkot justru menjadi moda yang paling memungkinkan menjangkau ruas-ruas jalan kecil,” jelasnya. Ia mengingatkan, jika ketergantungan pada kendaraan pribadi tidak dikurangi, derajat kemacetan akan semakin tinggi dan berdampak pada kualitas hidup warga. Dalam forum reses tersebut, Puguh kembali mengangkat gagasannya sejak 2022 tentang penguatan angkot melalui program “Angkot Halokes” (Angkutan Sekolah). Menurutnya, setiap hari puluhan ribu pelajar berangkat dan pulang sekolah di Kota Malang. Jika mayoritas diantar orang tua menggunakan kendaraan pribadi, maka kemacetan di jam masuk dan pulang sekolah sulit dihindari.

“Kalau anak-anak sekolah bisa difasilitasi menggunakan angkot yang nyaman dan aman, ini menjadi solusi kemacetan sekaligus menghidupkan kembali peran angkot,” katanya. Namun demikian, ia menekankan perlunya standarisasi dan revitalisasi armada, mulai dari kondisi kendaraan yang lebih nyaman, sistem keamanan yang terjamin, hingga metode pembayaran modern seperti QRIS atau skema by the service. Puguh juga menyinggung keberadaan Koridor 8 Trans Jatim yang telah beroperasi di Malang. Ia menilai angkot dapat berperan sebagai feeder (pengumpan) yang menghubungkan wilayah-wilayah kecil menuju koridor utama transportasi publik.

“Ini harus menjadi kerja kolaboratif antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pusat. Butuh keberpihakan kebijakan serta dukungan anggaran agar angkot tetap eksis dan mampu bertransformasi,” tegasnya. Ia berharap, melalui intervensi kebijakan yang serius, masyarakat dapat perlahan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. “Kalau transportasi publiknya nyaman dan terjamin, orang tua pun merasa aman. Ini bukan hanya soal angkot, tapi masa depan mobilitas Kota Malang,” pungkasnya. Reses ini menjadi bagian dari komitmen Puguh Wiji Pamungkas untuk menghadirkan solusi konkret atas persoalan perkotaan, sekaligus memperkuat peran transportasi publik sebagai fondasi kota yang ramah, nyaman, dan berkelanjutan.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



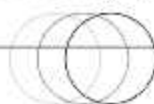
Kelas Nyaris Roboh, Harisandi Savari Soroti Minimnya Ruang Kelas Layak di Sampang

Kondisi ruang kelas yang rusak dan membahayakan keselamatan siswa kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil Madura, Harisandi Savari, menegaskan bahwa minimnya ruang kelas dan sarana pendidikan yang layak masih menjadi persoalan serius di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Sampang. Menanggapi kecemasan murid SDN Margantoko 1 Jrengik yang terpaksa belajar di ruang kelas dengan kondisi memprihatinkan, Harisandi menyatakan bahwa masalah infrastruktur pendidikan tidak bisa dianggap sepele. Menurutnya, kualitas dan kuantitas ruang kelas sangat berpengaruh terhadap proses belajar-mengajar dan kenyamanan siswa dalam menerima pendidikan dasar yang layak.

“Daerah-daerah yang tergolong tertinggal atau marginal seperti Sampang masih menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan ruang kelas. Ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan rasa aman siswa,” ujar anggota Fraksi PKS Jatim itu. Ia menegaskan, DPRD Jawa Timur memandang pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan sebagai prioritas utama yang harus diperhatikan dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Fasilitas sekolah yang layak, kata dia, merupakan fondasi penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Terkait upaya pengawalan isu pendidikan, Harisandi menjelaskan bahwa secara kelembagaan DPRD Jawa Timur memiliki mekanisme koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Pengawalan tersebut dilakukan melalui berbagai saluran, salah satunya dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kegiatan reses.

“Isu-isu pendidikan, termasuk minimnya ruang kelas dan kondisi sekolah yang tidak layak, kami kawal melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Aspirasi dari masyarakat, khususnya saat reses, menjadi bahan penting dalam pengawasan dan pembahasan di DPRD,” jelasnya. Lebih lanjut, Harisandi menyampaikan bahwa dari sisi komisi dan fraksi, DPRD secara aktif meminta data kondisi ruang kelas rusak serta kebutuhan Ruang Kelas Baru (RKB) di berbagai daerah. Selain itu, DPRD juga menanyakan progres perbaikan dan daftar prioritas lokasi yang harus segera ditangani oleh pemerintah daerah. “Kami ingin memastikan data yang kami terima akurat, sehingga penanganannya tepat sasaran dan tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Untuk menyikapi kondisi SDN Margantoko 1 Jrengik yang dinilai sudah membahayakan keselamatan siswa, Harisandi menekankan perlunya langkah penanganan darurat. Ia mendorong agar ruang kelas yang rawan segera dihentikan penggunaannya dan kegiatan belajar-mengajar dialihkan sementara ke tempat yang lebih aman, seperti balai desa atau kelas darurat. “Kami juga merekomendasikan adanya pembangunan atau rehabilitasi darurat agar siswa bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” pungkas Harisandi.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



SURABAYA (Lentera) — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Harisandi Savari mengingatkan Dinas Perhubungan (Dishub) provinsi setempat untuk mempercepat pemetaan dan penanganan serius, terhadap titik-titik rawan kemacetan di jalur poros Madura menjelang arus mudik Lebaran 2026. Menurutnya, kemacetan rutin yang terjadi di Pulau Madura perlu diantisipasi lebih awal, agar pergerakan pemudik menuju empat kabupaten tidak terhambat kepadatan kendaraan. "Harapannya ada titik-titik yang bisa ditangani secara efektif ya. Dinas Perhubungan harus bergandengan tangan dengan kepolisian untuk mengatur lalu lintas di lapangan," ungkap Harisandi, Kamis (19/02/2026). Politisi PKS tersebut menjelaskan, simpul kemacetan di Madura masih didominasi oleh pasar tumpah yang berada di sepanjang jalur poros utama. Aktivitas perdagangan yang meluber hingga ke badan jalan dinilai menjadi penyebab utama tersendatnya arus kendaraan. Ia merinci, sejumlah titik yang dinilai rawan dan perlu menjadi prioritas penanganan.

"Terutama di titik-titik pasar yang seringkali membuat kemacetan. Mulai dari Pasar Tanah Merah (Bangkalan), Blega, hingga Patamon (Sampang). Selain itu, di wilayah Telanakan (Pamekasan) juga perlu perhatian serupa," tegasnya. Legislator dari daerah pemilihan Madura itu menambahkan, penanganan pasar tumpah memerlukan strategi khusus agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas. Ia mendorong Dishub Jatim menyiapkan personel yang cukup serta rekayasa lalu lintas yang matang. "Ini bagaimana nantinya bisa ditangani secara baik oleh Dinas Perhubungan Jawa Timur. Jangan sampai penumpukan kendaraan dibiarkan tanpa solusi yang jelas, karena kenyamanan pemudik harus diutamakan," pungkasnya. Diketahui, jalur nasional sepanjang lebih dari 300 kilometer menjadi urat nadi utama yang menghubungkan empat kabupaten di Madura, mulai dari Bangkalan hingga Sumenep. Lintas selatan menjadi tumpuan beban kendaraan paling berat karena menghubungkan pusat pemerintahan dan ekonomi.

Sementara itu, jalur lintas utara belum optimal menjadi alternatif bagi kendaraan besar maupun pemudik karena kontur jalan yang lebih sempit dan minim fasilitas pendukung. Kemacetan di Madura disebut bukan disebabkan oleh kerusakan fisik jalan, melainkan fenomena penyempitan arus atau bottleneck di titik pasar tumpah seperti Pasar Tanah Merah, Blega, dan Patamon. Aktivitas perdagangan serta parkir liar membuat kapasitas jalan menyusut dan memicu antrean panjang, terutama saat hari pasar dan musim mudik.

Setujui Perubahan Perda Penanggulangan Bencana, Tekankan Mitigasi dan Perlindungan Kelompok Rentan



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





SERAP ASPIRASI RESES, AGUS CAH DORONG PEMBERDAYAAN PURNA MIGRAN DAN DISABILITAS

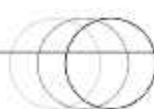
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Fraksi PKS, Agus Cahyono, memanfaatkan masa reses pada 8–15 Februari 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) IX, salah satunya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Dalam pertemuan tersebut, isu pemberdayaan purna Buruh Migran Indonesia (BMI) dan penyandang disabilitas menjadi perhatian utama.

Agus Cahyono menyampaikan bahwa reses merupakan momentum penting untuk mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di akar rumput. Pada pertemuan awal reses, ia berdialog dengan komunitas purna migran Indonesia serta Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI).

“Dari purna buruh migran, aspirasi utamanya adalah kebutuhan pelatihan dan pendampingan usaha agar mereka tidak kembali menjadi buruh migran. Harapannya, sepulang dari luar negeri mereka bisa mandiri secara ekonomi di negeri sendiri,” ujar Agus.

Menurutnya, semangat “sukses di negeri orang, mandiri di negeri sendiri” yang diusung para purna migran perlu mendapat dukungan konkret dari pemerintah melalui program pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta pendampingan berkelanjutan.

Selain itu, aspirasi serupa juga disampaikan oleh kalangan penyandang disabilitas. Mereka berharap mendapatkan kesempatan kerja yang setara serta dukungan nyata dalam pengembangan potensi dan prestasi.



“Teman-teman disabilitas memiliki harapan yang sama, yakni memperoleh peluang kerja yang layak dan setara. Mereka juga membutuhkan dukungan program pemberdayaan, termasuk pelatihan, pendampingan, hingga dukungan bagi atlet disabilitas yang berprestasi,” jelasnya.

Agus Cahyono menambahkan, organisasi penyandang disabilitas juga mengusulkan adanya dukungan hibah organisasi untuk menjalankan program pemberdayaan, pelatihan, serta pembinaan atlet. Menurutnya, penyandang disabilitas tidak hanya membutuhkan perlindungan sosial, tetapi juga ruang aktualisasi dan kemandirian ekonomi.

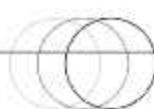
Seluruh aspirasi yang dihimpun dalam masa reses ini, kata Agus, akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPRD Jawa Timur. Ia menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan, khususnya purna migran dan penyandang disabilitas.

“Reses ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus dirasakan oleh semua, tanpa terkecuali. Negara hadir bukan hanya melindungi, tetapi juga memberdayakan,” pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

Kawal Beasiswa untuk Ribuan Siswa, Puguh DPRD Jatim Sebut Investasi Kedaulatan Bangsa





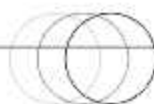
VIRAL TELUR BERLUMUR KOTORAN DI MAGETAN, AGUS CAH DPRD JATIM DESAK PENGAWASAN KETAT MBG

Viral di media sosial temuan telur rebus berlumur kotoran ayam dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, memicu sorotan publik. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, mendesak agar pengawasan pelaksanaan MBG diperketat. Agus, yang akrab disapa Agus Cah, menegaskan bahwa pada prinsipnya program MBG merupakan kebijakan yang sangat baik untuk masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi pelajar.

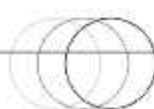
Menurutnya, secara konsep program tersebut telah dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) dan dukungan anggaran yang memadai. "Tujuan MBG ini bagus, semuanya sudah tercukupi. Sudah ada SOP termasuk anggaran, sehingga program ini sangat baik bagi masyarakat," ujarnya. Namun demikian, Agus menilai insiden yang terjadi di Lembeyan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan teknis di lapangan. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan ketat sebelum makanan didistribusikan ke sekolah-sekolah.

"Yang pertama, sebelum dikirim tentunya tim kontrol perlu memperketat pemeriksaan oleh tim MBG saat masih di dapur sebelum pendistribusian. Jika muncul peristiwa tersebut maka itu lemah pengawasannya," tegas legislator asal Trenggalek tersebut. Kasus ini mencuat setelah sebuah video yang diunggah akun Facebook Tri Winarsih memperlihatkan telur rebus yang diduga belum dibersihkan secara maksimal sebelum dimasak. Unggahan tersebut langsung memicu beragam respons warganet. Selain pengawasan, Agus juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh untuk mencari akar persoalan, termasuk kemungkinan keterbatasan kapasitas dapur penyedia makanan.

"Misalnya kapasitas dapur kurang memadai, tentunya bisa ditambah sehingga bisa mengantisipasi adanya masalah dalam penyaluran MBG ke sekolah-sekolah," tandasnya. Ia berharap kejadian ini menjadi bahan pembenahan agar program MBG tetap berjalan optimal dan tidak menurunkan kepercayaan masyarakat. "Programnya sudah baik, tinggal penguatan pengawasan dan evaluasi teknis di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," pungkasnya.



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)



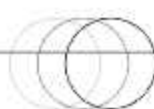


SETUJUI PERUBAHAN PERDA PENANGGULANGAN BENCANA, TEKANKAN MITIGASI DAN PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKS, Khusnul Khuluk, menggelar Reses Masa Sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Tegal Gede, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jumat (13/02/2026). Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi secara langsung. Acara tersebut dihadiri Ketua DPD PKS Jember dan Lumajang, tokoh masyarakat, kader, relawan, serta warga setempat. Suasana berlangsung tertib dan penuh keakraban, dengan warga aktif menyampaikan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari.

Luncurkan Program SAKTI, Perkuat Kader dan SDM

Bertepatan dengan peluncuran program "SAKTI" (Sekolah Patriot Kader Indonesia) di Jember, Khusnul menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah dan nasional. "PKS memandang kader sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Sekolah kepemimpinan partai ini menjawab tantangan masyarakat untuk menghadirkan pengambil kebijakan dan pelayan publik alternatif yang memiliki kapasitas terbaik," ujar Khusnul.



la menambahkan, pembangunan tidak hanya soal fisik, tetapi juga kualitas kepemimpinan dan integritas SDM yang akan mengelola kebijakan publik di masa depan. Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah persoalan mendesak, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, sistem drainase yang kurang optimal, hingga minimnya penerangan jalan di beberapa titik wilayah Jember.

Selain itu, sektor pertanian juga menjadi perhatian. Warga mengeluhkan serangan hama tikus yang merugikan petani, persoalan fasilitas pengairan, serta keterbatasan akses permodalan bagi pelaku UMKM dan peternak kecil. Menanggapi hal tersebut, Khusnul menegaskan bahwa seluruh aspirasi akan dibawa ke pembahasan tingkat DPRD Jawa Timur, khususnya dalam penyusunan program prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2026.

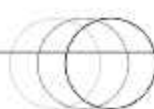


“Aspirasi ini tidak boleh berhenti di forum reses saja. Kami akan kawal dalam pembahasan anggaran dan koordinasi dengan dinas terkait agar benar-benar terealisasi,” tegasnya. Sebagai bentuk komitmen nyata, Khusnul mencontohkan program yang telah berjalan, seperti KIP Jawara serta akses bantuan peternakan bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah, khususnya kelompok Desil 1-5. “Program-program ini harus tepat sasaran. Kita ingin masyarakat kecil, petani, peternak, dan pelaku UMKM benar-benar merasakan kehadiran negara,” katanya.

la juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan. Melalui reses ini, Khusnul berharap komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat terus terjaga, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan riil warga Jember dan sekitarnya.

Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)

Kawal Beasiswa untuk Ribuan Siswa, Puguh DPRD Jatim Sebut Investasi Kedaulatan Bangsa



Rencana pemerintah mengimpor 580 ribu indukan ayam (parent stock) dari Amerika Serikat mendapat sorotan dari kalangan legislatif di Jawa Timur. Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, memberikan catatan tegas agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak merugikan peternak lokal. Menurut Khusnul, jika indukan yang diimpor memang diperuntukkan bagi kebutuhan breeding atau pembibitan untuk menghasilkan ayam petelur dan pedaging, maka langkah tersebut masih dapat dipahami. "Kalau yang diimpor itu indukan untuk breeding, yang akan menetas bibit ayam petelur dan pedaging, saya rasa tidak apa-apa. Untuk menambah populasi memang perlu bibit unggul supaya produktivitasnya tinggi," ujar Anggota Fraksi PKS Jatim itu.

Ia menekankan bahwa kualitas parent stock menjadi kunci utama dalam meningkatkan produksi nasional. Indukan yang tidak berkualitas justru berisiko menurunkan performa hasil ternak di tingkat peternak. "Jangan sampai indukan yang masuk tidak berkualitas. Kalau ingin produksi meningkat, harus dari bibit yang benar-benar unggul," tegasnya. Namun demikian, Khusnul menyatakan kurang sepakat apabila impor dilakukan dalam bentuk daging ayam atau telur konsumsi. Ia menilai Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk mencukupi kebutuhan tersebut secara mandiri. "Kalau berupa daging atau telurnya yang diimpor, tentu kami kurang setuju. Kita ini negara agraris, potensinya besar. Ke depan harus diberi ruang agar bisa mandiri," katanya.

Lebih jauh, Khusnul mendorong pemerintah memberikan ruang dan dukungan anggaran kepada peneliti dalam negeri untuk mengembangkan indukan ayam unggul secara mandiri. Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah varietas ayam kampung hasil persilangan yang dikembangkan oleh masyarakat dan peneliti lokal. Beberapa jenis ayam kampung tersebut dinilai memiliki produktivitas cukup baik, baik sebagai petelur maupun pedaging.

"Ayam kampung hasil persilangan itu sudah banyak yang bagus. Ada yang bisa bertelur hingga sekitar 300 butir per tahun, dan dagingnya juga disukai masyarakat. Itu murni hasil inovasi warga kita," jelasnya. Karena itu, ia berharap kebijakan impor indukan ayam tidak membuat Indonesia bergantung dalam jangka panjang. "Silakan impor kalau memang untuk memperkuat breeding dan menambah populasi. Tapi riset lokal harus diperkuat, supaya kita bisa menghasilkan indukan unggul sendiri," pungkasnya.

**IMPOR 580 RIBU
INDUKAN AYAM DARI
AS DISOROT, KHUSNUL
DPRD JATIM BERI
CATATAN TEGAS**



Ringkasan Publikasi Media Eksternal (Media Monitoring)





Galeri Foto Kegiatan



Peresmian SPAM PDAM Kali Sono Desa Sumberwringin Kecamatan Klakah Kab Lumajang

Jl. Jojoran III No. 96, Mojo, Kec. Gubeng,
Surabaya (depan rumah bu Susi)
1 Feb 2026
Peserta 1.80-100 orang



Solowsemiran

The Southern Hotel Sby
7 Feb 2026



Tamu dari DPD

Ruang Fraksi
10 Feb 2026
Peserta 6 orang



Tamu dari Gema Pertiwi

Ruang Fraksi
10 Feb 2026
Peserta 7 orang



Reses

(Balai RT.08 RW.06) Jl.Sambiarum Lor
Gg. 11, Sambikerep, Sambikerep
1 Feb 2026
Peserta 1.80-100 orang



Reses

(Balai RW.04) Jl. Banjarsugihan Telaga
35-37, Banjarsugihan, Tandes
11 Feb 2026



Tamu dari Madrasah Aliyah Islam
Terpadu (MAIT) Insan Kamil
Sidoarjo

Ruang Banggar/Bamus
13 Feb 2026
Peserta 45 orang



Reses

(Balai RT.03 RW.18) Jl. Indrapura Jaya
223, Tanjung Perak, Pabean Cantian
14 Feb 2026
Peserta 7 orang



Reses

Dupak 5 No. 78, Jepara, Bubutan
14 Feb 2026



Undangan Narasumber (Sosialisasi & Konsolidasi Bipeka DPC Se-Kota Surabaya)

Aula KBTk IT Al-Uswah 2, Jl. Ubi II No.3,
Jagir, Kec. Wonokromo, Sby
15 Feb 2026



Reses

(Balai RT.02 RW.02) Jl. Arif Rahman
Hakim Gg. Pasar, Keputih, Sukolilo
15 Feb 2026



Solowsemiran

The Southern Hotel Sby
20 Feb 2026



Solowsemiran

Excotel
22 Feb 2026



Solowsemiran

Surabaya Suites
26 Feb 2026



Solowsemiran

Harris Gubeng
27 Feb 2026



MABUYA (Majelis Ibu Berdaya) Pengajian DPRa

Semolowaru Utara Gang 8 No. 7
(Rumah Bu Mila)
28 Feb 2026



Galeri Foto Kegiatan



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Kota Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
10 Februari 2026
100 Peserta Anggota pelopor Kabupaten Malang.



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
9 Februari 2026
100 Peserta 50 Sopir angkot & 50 relawan sekitar.



Galeri Foto Kegiatan



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Kota Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
10 Februari 2026
100 Peserta Anggota pelopor Kabupaten Malang.



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
9 Februari 2026
100 Peserta 50 Sopir angkot & 50 relawan sekitar.



Galeri Foto Kegiatan



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
11 Februari 2026
100 Masyarakat umum



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
12 Februari 2026
Pembimbing pelopor Kota Batu dan Kabupaten Malang.



Galeri Foto Kegiatan



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
13 Februari 2026
100 Peserta Masyarakat umum



kompilasi aspirasi, keluhan, dan usulan masyarakat di daerah pemilihan (dapil)

Jl. Blimbing Indah Megah B6/22-22A, Kota Malang.
14 Februari 2026
Pembimbing pelopor Kota Malang



fokus menuju preventif (pencegahan), pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat

Jl. Sumber Nongko, Desa Sumberputih, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
19 Februari 2026
Kader TPK Desa Sumberputih, Desa Wonorejo, Desa Bambang, Desa Bringin, Desa Dadapan, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang



fokus menuju preventif (pencegahan), pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat

Jl. Panglima Sudirman No. 39A, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
20 Februari 2026
Kader TPK (Tim Pendamping Keluarga Kabupaten Malang)



Galeri Foto Kegiatan



fokus menuju preventif (pencegahan), pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat

Jl. Raya Kidangbang No. 02, RT 016 / RW 05, Dusun Jaten, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
21 Februari 2026
Kader TPK Desa Kidangbang, Desa Sukolilo, Desa Codo, Desa Blayu, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang



fokus menuju preventif (pencegahan), pemanfaatan teknologi, dan pemberdayaan masyarakat

Jl. Raya Kidangbang No. 02, RT 016 / RW 05, Dusun Jaten, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang
22 Februari 2026
Kader TPK Desa Sukonayar, Desa Ngembal, Desa Wajak, Desa Patokpici, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang



memperkuat ikatan sosial, menanamkan rasa peduli, dan mendorong tindakan kolektif dalam masyarakat

Jl. Gunung Sari, Tajinan Barat, Desa Gunung Sari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang
25 Februari 2026
Kader TPK dan Kader Kesehatan Kecamatan Tajinan



memperkuat ikatan sosial, menanamkan rasa peduli, dan mendorong tindakan kolektif dalam masyarakat

Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang
26 Februari 2026
Penerima Beasiswa, Putri Jawa dan Kader TPK, Kader Kesehatan Kecamatan Bululawang



Galeri Foto Kegiatan



memperkuat ikatan sosial, menanamkan rasa peduli, dan mendorong tindakan kolektif dalam masyarakat

Dusun Aran-Aran, Desa Sumberejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
27 Februari 2026
Guru, Wali Murid dan Masyarakat Desa



memperkuat ikatan sosial, menanamkan rasa peduli, dan mendorong tindakan kolektif dalam masyarakat

Jl. Panglima Sudirman No. 05, Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang
28 Februari 2026
Struktur PKS



Galeri Foto Kegiatan



Kegiatan Haul ke IV sultan abdurrahman ini bertujuan untuk mengingat jasa-jasa leluhur lebih-lebih area keraton sumenep yang memang notabene merupakan pusat budaya dan tradisi di pulau madura.

Astah Tinggi Sumenep
13 Februari 2026
Kurang lebih 200 Orang



Solosemiran

Tugu, Trenggalek
Februari 2026
Konstituen



Solosemiran

Tugu, Trenggalek
Februari 2026
Konstituen



RESES

Klakah, Lumajang
8 Februari 2026
100



SOLOWSEMIRAN

Sukodono, Lumajang
20 Februari 2026
125



SOLOWSEMIRAN

Jarit, Candipuro, Lumajang
19 Februari 2026
125



SOLOWSEMIRAN

Senduro, Lumajang
19 Februari 2026
125



RESES

Yosowilangun, Lumajang
15 Februari 2026
100



Pasar Tani Lumajang

Sukodono, Lumajang
20 Februari 2026
125



Solosemiran, Launching Program Sakti DPD Jember

Jember
13 Februari 2026
125



RESES

Kencong, Jember
11 Februari 2026
100

FRAKSI PKS PROVINSI DPRD JAWA TIMUR



www.fraksipksjatim.id



[fraksipksjatim](https://www.facebook.com/fraksipksjatim)